

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cancel culture merupakan segala bentuk penarikan dukungan dari seseorang yang dinilai telah melanggar atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika dan norma yang diterima dan berlaku oleh publik (Ng, 2020). Fenomena *cancel culture* biasanya dilakukan dengan cara menyebarkan cerita, foto, potongan video, atau rekaman suara di media sosial yang mengarah kepada perilaku buruk atau kesalahan seseorang. Kemudian publik akan beramai-ramai memboikot karya, melenyapkan pengaruh, dan tidak lagi memberikan ruang di hadapan publik (Wahyudiputra et al., 2021). Budaya *cancel culture* ini seringkali dilakukan melalui media sosial dimana seseorang dapat dipermalukan, dikecam, bahkan sampai kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari tindakan yang dianggap merugikan atau tidak pantas.

Cancel culture dapat didefinisikan sebagai aksi memboikot seseorang berdasarkan dari pernyataan atau tindakan yang dilakukan di masa lalu yang menyinggung atau bersikap problematik. *Cancel culture* juga dikenal sebagai pembatalan, penolakan, pengabaian, atau pemboikotan (Juniman, 2023). Alan Dershowitz dalam bukunya yang berjudul *Cancel Culture* (2020) menyatakan bahwa *cancel culture* merupakan bentuk baru dari Stalinisme yang dikembangkan oleh Joseph Stalin pada akhir tahun 1920 hingga awal 1950, yakni aksi boikot yang ditandai oleh kontrol ketat terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi. Stalinisme ini diterapkan oleh Pemerintah Soviet sebagai kebijakan represif untuk

mengendalikan informasi dan menghukum dengan cara pengasingan penjara atau eksekusi bagi individu yang dianggap sebagai musuh negara atau melawan rezim (Ayudarma, 2022). Meskipun dengan sifat dan metode yang berbeda, Stalinisme ini menunjukkan bagaimana kontrol sosial melalui pengucilan dan pembatalan dapat dilakukan oleh pemerintah.

Seiring perkembangan zaman, fenomena *cancel culture* ini kembali muncul di platform digital seperti Twitter atau X dan Instagram untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap tindakan atau pernyataan yang dianggap tidak etis atau diskriminatif (Santoso, 2023). *Cancel culture* muncul sebagai respon kolektif dari masyarakat terhadap segala tindakan atau ucapan yang melanggar norma atau nilai tertentu seperti keadilan atau moralitas (Velasco, 2020). Media sosial memiliki peran penting dalam fenomena ini sebagai platform utama untuk menyebarkan informasi dan menyampaikan pendapat, dan membentuk opini publik sehingga memungkinkan masyarakat untuk dengan cepat mengorganisasikan aksi bersama, baik itu dalam bentuk pemboikotan maupun kritik massal. Fenomena sosial ini hangat diperbincangkan karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat.

Cancel culture dapat digunakan sebagai kontrol sosial dan memperjuangkan keadilan sosial atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari seorang *public figure* (Rianto et al., 2024). Seperti pada kasus yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2017, gerakan *cancel culture* dipopulerkan kembali melalui tagar #MeToo yang muncul setelah terkuaknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu produser film terkenal Hollywood, Weinstein Harvey. Gerakan #MeToo ini sebagai bentuk dukungan terhadap korban

pelecehan seksual agar berani bersuara dan menjadi simbol perlawanan kepada pelaku pelecehan seksual (Muharman et al., 2022) . Hal serupa juga pernah terjadi di Indonesia yang dilakukan pada artis Saipul Jamil, berdasarkan dari *finpedia.id*, 2021 glorifikasi atas sambutan *infotainment* untuk Saipul Jamil yang baru dibebaskan dari lapas memantik reaksi keras publik. Publik beramai-ramai menandatangani petisi digital untuk memboikot pedangdut itu tampil di stasiun tv manapun karena dinilai tidak melihat sisi psikologis korban.

Namun di sisi lain, *cancel culture* ini bisa sangat berdampak negatif jika tidak dilakukan dengan penilaian dan pemahaman konteks berita yang tepat karena dapat membungkam pendapat suatu pihak, membatasi hak berbicara, mendapat *bullying* dan *harassment* di hadapan publik atau mendapat pengucilan dengan alasan yang subjektif (Asrori, 2024). Fenomena ini diperkuat oleh media sosial di era digital yang memungkinkan penyebaran informasi dan pembentukan opini publik berlangsung secara cepat dan masif. Dengan adanya viralitas konten di media sosial ini, memungkinkan untuk terjadinya pembingkaiian berita atau *framing* informasi melalui pemotongan video, penggunaan judul konten yang provokatif, maupun menghilangkan atau menonjolkan konteks informasi tertentu, sehingga semakin mempengaruhi persepsi publik dalam memahami atau menilai suatu peristiwa (Azmi, 2025).

Berdasarkan dari *cnnindonesia.com*, 2024 contoh kasus *cancel culture* yang terjadi di Indonesia baru-baru ini menimpa seorang *security* sebuah mall di Jakarta Pusat terkait kasus penganiayaan hewan. Dalam sebuah video yang viral di media sosial X, terlihat *security* yang diketahui bernama Nasarius memukul seekor anjing dengan tangan di bagian kepala. Pasca insiden tersebut, pihak mall

memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerjanya. Namun beberapa hari kemudian, muncul sebuah video permintaan maaf dan klarifikasi dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Ia yang menjelaskan alasan memukul anjing yang sedang ia handle karena anjing tersebut menerkam seekor anak kucing. Kasus ini berakhir damai dan pihak vendor *security* K9 pun tidak jadi memecat Nasarius. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan praktik dari *cancel culture* yang salah sasaran dan menyebabkan target yang mengalami *cancelling* terkena dampak yang signifikan baik secara individu maupun kehidupan bersosial dari hal tersebut. Hal ini digambarkan dalam salah satu film Indonesia yang berjudul Budi Pekerti.

Film Budi Pekerti merupakan film drama Indonesia karya dari sutradara Wregas Bhanuteja yang dirilis pada 02 November 2023. Film ini diproduksi oleh Rekata Studio dan Kaninga Pictures yang diproduksi di kota Yogyakarta dan menjadi film yang tayang perdana di TIFFF (*Toronto International Film Festival*) 2023 di Toronto, Kanada. Film Budi Pekerti adalah sebuah karya audio visual yang ide cerita dari film ini menggambarkan nilai-nilai budaya dan moralitas dalam konteks masyarakat dan keluarga.

Film ini mengangkat cerita tentang Bu Prani, seorang guru BK (Bimbingan Konseling) di sebuah SMP Yogyakarta yang terlibat perselisihan dengan seorang pengunjung di pasar, namun kejadian tersebut justru direkam pengunjung lain dan diunggah ke media sosial. Karna video yang dianggap kontroversial tersebut viral, Bu Prani dinilai tidak mencerminkan sikap seorang guru dan mendapat banyak kecaman serta komentar negatif lainnya dari netizen. Tidak hanya itu, Bu Prani juga dikucilkan dari komunitas senamnya bahkan

mendapat protes keras dari para guru dan orang tua murid di sekolahnya. Kedua anak Bu Prani, Muklas dan Tita harus ikut merasakan dampak *cancelling* seperti ikut dicibir dan dipecat dari pekerjaannya. Segala cara dilakukan mulai dari membuat video klarifikasi sampai meminta bantuan anak didik Bu Prani dulu untuk membuat video dukungan demi memperbaiki kembali citra Bu Prani, namun tetap tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap *cancelling* yang sedang terjadi.

Berkaitan dengan isu yang akan diteliti yaitu mengenai representasi *cancel culture* dalam film. Peneliti menemukan penelitian terdahulu yang mengkaji isu yang sama yaitu mengenai *cancel culture* di media sosial, namun dengan subjek penelitian yang berbeda. Penelitian ini dilakukan oleh Placio, Vargas, dan Estigoy pada 2021 dengan judul “*Virtual Call Out: The Aggressions and Advantages of Cancel Culture*”.

Penelitian ini mengkaji tentang praktik *cancel culture* di media sosial yang memiliki dua sisi, yakni sebagai bentuk agresi sosial digital yang dapat memicu serangan verbal dan menghancurkan reputasi individu, serta sebagai sebuah kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap individu yang dianggap melakukan tindakan yang bermasalah atau melanggar norma. Penelitian ini berfokus pada praktik interaksi sosial di ruang digital, seperti bagaimana pengguna media sosial melakukan kritik, pelabelan, dan pemboikotan terhadap individu tertentu melalui analisis isi konten dari artikel ilmiah mengenai *cancel culture*. Penelitian ini dibatasi dengan tujuan tersebut dan didapati hasil berupa penyebab dari praktik *cancel culture* bermula dari perbedaan pandangan politik dan diskriminasi yang menyebabkan berbagai

reaksi netizen seperti menindas, menuntut pemecatan, dan sebagainya. Namun reaksi dari korban justru hanya berfokus kepada masyarakat yang mendukung dan tidak terlalu peduli pada penindasnya.

Penelitian terdahulu membahas isu sosial *cancel culture* dengan berfokus pada korban terdampak berdasarkan sudut pandang dari dampak *cancel culture* terhadap karier dan mata pencaharian mereka. Melihat dari batasan dan hasil penelitian terdahulu ini, peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian terkait dengan isu sosial serupa namun dikaji dalam sudut pandang yang berbeda, yaitu dari representasi sebuah film menggunakan model analisis semiotika. Penelitian ini menggunakan semiotika karena film merupakan media audio visual yang dibangun melalui berbagai tanda visual dan verbal. Melalui analisis semiotika khususnya dengan teori Roland Barthes, memungkinkan peneliti untuk menganalisis makna denotatif, konotatif, dan mitos yang terkandung di balik tanda-tanda yang membentuk representasi praktik *cancel culture* dalam film serta bagaimana makna tersebut dibangun melalui simbol, dialog, dan narasi yang ditampilkan.

Film dianggap sebagai media komunikasi massa yang sangat sering digunakan untuk menyampaikan pesan kepada seseorang maupun kelompok dan sebagai media yang menggambarkan kehidupan sosial dalam masyarakat. Menurut Wibowo (dalam Rizal, 2014) film merupakan salah satu alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada masyarakat melalui narasi dan juga dapat dimaknai sebagai ekspresi seni bagi para seniman untuk mengungkapkan ide ceritanya. Dalam film Budi Pekerti ini, representasi tentang budaya *cancel culture* diwakili melalui narasi tokoh utama maupun melalui peristiwa-peristiwa yang

terjadi dalam plot cerita seperti dalam dialog, tindakan, atau reaksi tokoh lain terhadapnya.

Film ini relevan dengan topik yang akan peneliti teliti karena film ini merepresentasikan isu sosial yang belakangan sering terjadi di Indonesia yaitu *cancel culture*. Film ini menyoroti proses terjadinya *cancel culture* melalui kejadian viral di media sosial serta dampak yang ditimbulkan jika peradilan publik terjadi tanpa narasi informasi yang utuh dan pemahaman penuh tentang konteks. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi edukasi terhadap warganet yang aktif menggunakan sosial media untuk lebih kritis dan bijak dalam menanggapi suatu isu yang beredar karena setiap respon yang diberikan akan memiliki dampak terhadap individu lainnya. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis tanda yang ditemukan dalam setiap adegan-adegan tertentu, dialog, atau simbol visual yang merepresentasikan *cancel culture*. Makna dari tanda tersebut akan dianalisis lebih dalam menggunakan teori yang sudah dipilih.

Berkaitan dengan hal ini, peneliti melihat bahwa film Budi Pekerti menarik untuk diteliti lebih dalam, terkhusus mengenai tanda-tanda yang dibangun dalam merepresentasikan *cancel culture* di dalam film. Sehubungan peneliti ingin mengetahui lebih dalam bentuk dari representasi *cancel culture* dalam film Budi Pekerti melalui adegan-adegan, dialog, atau simbol visual peneliti menggunakan teori semiotika Roland Barthes dengan paradigma interpretif untuk mengupas dan membedah film ini lebih dalam. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang diatas, peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Representasi *Cancel Culture* Dalam Film Budi Pekerti (Analisis Semiotika Roland Barthes)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktik *cancel culture* direpresentasikan dalam film Budi Pekerti melalui makna denotatif, konotatif, dan mitos?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan yang dicapai peneliti adalah:

1. Menganalisis makna denotatif, konotatif, dan mitos dari tanda-tanda yang merepresentasikan praktik *cancel culture* dalam film Budi Pekerti.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap nantinya dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam wawasan di bidang Ilmu Komunikasi terkhusus mengenai analisis semiotika pada film.
2. Penelitian ini berkaitan dengan isu *cancel culture* yang terjadi di media sosial, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi peneliti lain yang ingin mengambil topik penelitian yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan tentang *cancel culture* yang terjadi baik di media sosial maupun di kehidupan nyata masyarakat dan bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap target *cancelling* pada kehidupan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dukungan dalam menyumbangkan ide dan masukan bagi sineas Indonesia untuk terus memproduksi dan menghasilkan film-film yang berkualitas.

